



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. SADLY LESNUSA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 239816

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.799.500.000

1. Tanah Seluas 2460 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 123.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 388 m2/253 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 1.031.500.000
3. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 11971 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 3.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 14.352.839**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.816.852.839



III. HUTANG

Rp. 385.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.431.852.839

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.